



Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)

Eni Zulaiha,^{1*} Kartini Fujiyanti Agustin,² Nida Al Rahman³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; enizulaiha@uinsgd.ac.id

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; kartinifujiyanti19@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; lufifandada@gmail.com

* Correspondence

Received: 2021-12-13; Accepted: 2022-04-24; Published: 2022-04-27

Abstract: This paper tries to further examine the responses of commentators in the midst of the upheavals of the government during the Old Order, New Order, and Reformation eras. Interpretation which is a human product can be used as a parameter of Islam that the government running is state is in accordance with the teachings or not, so that in these three periods a continuous commentator was born with the politics that was going on at that time. The method used in this research is descriptive analysis based on library research. The findings of this study are that from the three periods of power, namely the Old Order, the New Order, and the Reformation, the are similarities in the style of interpretation used, namely *Adab Ijtima'i*, but different from the method of interpretation used, namely in the Old Order period, the method of interpretation used is the Tahlili method while the next two periods, namely the Thematic method according to the development of interpretation at that time.

Keywords: local interpretation; interpretation methodology; power politics; social interpretation; textual analysis

Abstrak: Tulisan ini mencoba menelaah lebih lanjut respon mufasir di tengah pergolakan pemerintah pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Tafsir yang merupakan produk manusia bisa dijadikan parameter Islam bahwa pemerintah menjalankan kenegaraannya sudah sesuai dengan ajaran atau tidak, sehingga pada tiga periode tersebut lahir mufasir yang berkesinambungan dengan politik yang sedang terjadi pada masanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis berbasis penelitian kepustakaan. Temuan dari penelitian ini bahwa dari tiga periodisasi kekuasaan yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terdapat kesamaan dalam corak penafsiran yang digunakan yakni *Adab Ijtima'i*. namun berbeda dalam penggunaan metode penafsirannya yakni pada periode Orde Lama, metode penafsiran yang digunakan adalah metode tahlili sedangkan dua periode selanjutnya yakni metode tematik sesuai dengan perkembangan penafsiran pada saat itu.

Kata Kunci: tafsir lokal; metodologi tafsir; politik kekuasaan; tafsir sosial; analisis tekstual

1. Pendahuluan

Tafsir sebagian besarnya merupakan hasil dari produk pemikiran manusia. Secara intens, dinamisasi pemikiran dipengaruhi oleh faktor pendorong pada pergerakan proses tersebut (Rahman, 2016a). Politik, budaya, ekonomi sosial, dan teknologi merupakan faktor yang diyakini menjadi penentu perkembangan produk pemikiran (Mulyaden, 2021). Pandangan mengenai tafsir bukanlah sesuatu yang statis, baik produk maupun keilmuannya terus berkembang sampai saat ini. Tafsir hadir dengan berbagai pendekatan, metode, dan alat analisisnya mengikuti posisi dan keberadaan al-Qur'an sebagai kitab yang otentik dan merupakan sumber ajaran Islam yang sentralistik. Penafsiran al-Quran adalah upaya untuk dapat memahami ayat-ayat al-Qur'an. Disisi lain, penafsiran al-Qur'an menjadi

cerminan perkembangan corak pemikiran dan metodologi yang diterapkan mufasir sesuai dengan masa yang dihadapinya (Ahmad E.Q. & Sartika, 2020).

Tafsir pada mulanya merupakan ilmu yang membahas bagaimana memahami kandungan al-Qur'an, sehingga objek yang dikaji pada saat itu masih sangat luas. Al-Zarqani mempersempit definisi tafsir menjadi ilmu yang mengkaji keragaman al-Qur'an dalam rangka memahami firman Allah SWT sesuai dengan kadar kemampuan manusia *bi qadr al-thaqah al-basyariyah* dan tentu kualitasnya bersifat variatif ditentukan oleh kapasitas intelektual manusia untuk menyibak maksud Allah di dalam al-Qur'an (Al-Zarqānī, 1995). Dengan demikian, maka kewajiban seorang mufasir hanya tertuju pada bagaimana memahami makna al-Qur'an sesuai keilmuan serta latar belakang yang melingkupinya. Seorang mufasir hanya seorang yang mencari kebenaran bukan penentu kebenaran.

Kajian Abd al-Rahman Hully yang berfokus pada pendalaman gagasan Muhammad bin al-Fadhil al-'Asyur dalam karyanya *al-Tafsir wa Rijaluh* yang pembahasannya mengenai *manahij al-Mufassirin* menemukan titik tolak yang menurutnya menjadi landasan bahwa tafsir merupakan sebuah disiplin ilmu pengetahuan (Husni, 2012). Terdapat dua sifat al-Quran sehingga al-Quran menjadi tolak ukur munculnya tafsir sebagai ilmu pengetahuan, pendapat ini dikemukakan oleh Fadhil bin 'Asyur. *Pertama*, al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, fakta bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Sifat pertama menetapkan tentang keabsolutan kebenaran, sedang sifat kedua membuka ruang rasionalitas pada rasionalitas yang merupakan wilayah akal dalam jangkauannya terhadap ilmu (Rahman, 2016b).

Politik kekuasaan secara leksikal mengarah pada dua makna yaitu politik (*politics*) dan kekuasaan (*power*) (Crespy & Vanheuverzwijn, 2019). Jika pendekatan yang dipakai meletakkan power sebagai subjek dominan atas politik, tentu akan menghasilkan terminologi dominasi, beruntungnya politik kekuasaan ini telah menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yaitu menjadi term ilmu sosial yang secara diskursus menjadi ilmu yang hangat dan berkembang (Svarstad et al., 2018). Politik kekuasaan jika dilihat dari perspektif historis yang pendekatan kekuasaannya merujuk pada teori otoritas Max Weber bahwa di dalam masyarakat modern pemberian wewenang atau otoritas yang bersumber dari hukum atau perundang-undangan maka model otoritas ini mengutamakan birokrasi (politik dan ekonomi) (Van der Kamp, 2021).

Lord Acton dalam adagium populernya mengatakan bahwa "*kekuasaan cenderung kepada penyalahgunaan, tapi kekuasaan tidak terbatas, maka pasti akan tidak terbatas pula penyalahgunaannya*" (Lazarski, 2021). Dari sinilah tercetus pandangan teori keseimbangan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia, meskipun penerapannya belum absolut. Dalam Trias Politica, kekuasaan diklasifikasikan pada *legislatif* (pembuat undang-undang), *eksekutif* (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan *yudikatif* (kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya).

Tulisan ini akan fokus mengkaji perkembangan pemikiran Tafsir di Indonesia yang berkaitan dengan latar belakang faktor politik pemerintah dan kekuasaan (*power*). hal ini menarik untuk dikaji karena politik kekuasaan tentu memiliki daya pengaruh (*influence*) dan daya otoritas (*author*), sehingga dua variable ini dapat dibaca sebagai relasi kekuasaan dan pengetahuan yang telah banyak dibicarakan oleh pemikir kontemporer.

Objek kajian dalam ruang lingkup ini yaitu penggunaan metodologi dan corak penafsiran di Indonesia yang menggabungkan unsur pengetahuan dan kekuasaan didalamnya. Penggunaan metodologi dan corak tersebut dapat disinyalir karena pengaruh dari politik yang dalam implementasinya tidak boleh menyimpang dari dasar falsafah dasar Negara dan konstitusi. Beranjak dari titik tolak tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana metodologi dan corak penafsiran pada perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia ditengah dinamika politik kekuasaan yang mengitarinya.

Politik kekuasaan menggunakan teori otoritas memiliki definisi *power politics* yang dalam kamus bahasa Oxford yakni tindakan politik yang dilakukan seorang ataupun kelompok yang bermaksud meningkatkan kekuasaan atau pengaruhnya (Oxford, 2020). Selain itu politik kekuasaan juga memiliki definisi yang mengacu pada otoritas, yakni aktivitas politik yang dilakukan oleh pemegang jabatan

dan ditandai dengan penggunaan kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya (Foucault, 1997), biasanya dengan cara yang tidak etis untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan (Rahman, 2018). Definisi yang dilakukan dengan pendekatan *legal-rational authority* inilah yang menjadi acuan pengkajian dinamika politik kekuasaan yang berhubungan dengan perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia

Dinamika politik Islam di Indonesia, pada saat awal kemerdekaan mengalami tekanan gelombang pemikiran Nasionalis Indonesia yang mendominasi pengendalian sistem politik, menurut Howard M. Federspiel umat Islam terpaksa harus menyesuaikan diri dengan realitas perpolitikan tersebut (Federspiel et al., 1996). Pada saat itu kelompok Nasionalis Indonesia dengan ideologinya membatasi penggunaan ajaran Islam dengan tidak menerima ajaran Islam sebagai bagian yang penting dari kehidupan nasional dan hanya mendukung pedoman-pedoman yang berkaitan dengan masalah moral saja (Federspiel et al., 1996).

Keadaan ini mendorong sebagian umat Islam merespon tingkah laku dan kebijakan pemerintah dengan menulis tafsir al-Qur'an menggunakan metode penafsiran yang sesuai dengan bentuk penafsiran (*ma'tsur* dan *ra'yi*). Tafsir jika dilihat dari aspek historis sejatinya telah eksis pada era Nabi Muhammad SAW meskipun pembahasannya tidak komprehensif mencakup seluruh isi kandungan al-Qur'an, tetapi telah berkontribusi meletakkan sisi fundamental pada penafsiran. Topik penafsiran yang dilakukan pada zaman Nabi SAW apakah mencakup seluruh ayat atau tidak sudah dikaji oleh intelektual Muslim klasik dan kontemporer. Selanjutnya tafsir berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu sehingga dapat menjadi media untuk manusia dalam memahami al-Quran.

Menurut M. Faqih dalam penelitiannya mengenai metode tafsir Hamka, kajian metodologi penafsiran dalam konteks keindonesiaan terdapat dua teori; yaitu teori Yunan Yusuf dan Nashruddin Baidan. Karakteristik tafsir menurut Yunan Yusuf memiliki tiga unsur; 1. Metode (*ma'tsur* dan *ra'yi*), 2. Teknik penyajian (tahlili, tematik) 3. Pendekatan (sufi, fiqhi, falsafi dan lainnya). Adapun Nashruddin Baidan membaginya menjadi dua; 1. Komponen Eksternal, yang unsurnya tidak terlibat secara langsung seperti jati diri al-Qur'an (nasikh Mansukh, asbab nuzul) dan kepribadian mufassir. 2. Komponen Internal yang unsurnya terlibat langsung seperti metode penafsiran (global, tematik, analitis dan komparatif), corak penafsiran (fiqhi, sufi, dll) dan bentuk penafsiran (*ma'tsur* dan *ra'yi*) (Fatih, 2019).

Di Indonesia, realitas tersebut terus memberi nuansa yang dinamis. Howard M. Federspiel misalnya pernah melakukan penelitian dengan judul, *Popular Indonesian Literature of the Quran*, yang kemudian diterjemah ke dalam edisi Bahasa Indonesia (diterbitkan Mizan tahun 1996) dengan judul, *"Kajian Alquran Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab"*. Selanjutnya, Islah Gusmian melalui tesisnya yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Teraju tahun 2003 dengan judul, *"Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi"*. Kedua buku tersebut memberi informasi dinamika tafsir di Indonesia yang bergulir dengan begitu dinamis dan membentuk horizon baru dalam pemetaan studi tafsir. Keragaman gaya bahasa dan model penulisan tafsir muncul dalam nuansa yang berbeda. Pada Bab IV Horizon baru karya tafsir alquran di Indonesia, dari buku *"Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi"*, Islah Gusmian menegaskan, ada empat variabel yang menjadi titik pijak untuk menunjuk horizon baru karya tafsir al-Qur'an di Indonesia tersebut; 1. Aspek metodologi tafsir; 2. Sensitivitas tafsir, 3. Intelektualitas penafsir, dan 4. orientasi penulisan tafsir (Gusmian, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis akan menjadikan teori Nashruddin Baidan sebagai acuan menganalisis metode penafsiran pada masa Orde Baru, Orde Lama dan Reformasi dengan mengambil tafsir Hamka, Syu'bah Asa dan M. Quraisy Shihab sebagai objek penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti secara alamiah dan jelas, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (Rukin, 2019), dengan pendekatan berbasis kepustakaan (*library research*) atau studi pustaka, yaitu dengan metode pengumpulan data pustaka (buku, jurnal, artikel, dokumen pribadi dan lain sebagainya), membaca dan mencatatnya untuk mengklasifikasi dan menganalisis kajian dan mengolah bahan penelitian serta

membuat kesimpulan dan laporan. Penelitian ini menyajikan gambaran lengkap aspek sosial yang terjadi karena merupakan hasil eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena (Rahman, 2020). Tujuan langkah metode penelitian ini adalah membentuk gambaran secara objektif mengenai perkembangan Tafsir di Indonesia dan kaitannya dengan kekuasaan politik dari Era Orde Lama sampai Reformasi (1945-1998).

3. Hasil Penelitian

Perkembangan Tafsir Al-Quran Era Orde Lama

Pasca kemerdekaan Indonesia, penafsiran al-Quran terus berkembang di bawah kepemimpinan Soeharto, diantara tafsir yang muncul pada era ini adalah *Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Quran* karya KH. Bisri Musthafa, penafsiran ini ditulis dengan 30 juz sejak tahun 1957-1960, selain itu muncul juga tafsir al-Quran karya Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin yang bernama *Tafsir Quran* pada tahun 1959. Pada akhir era Orde Lama, muncul *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka di tahun 1967. Penulis akan menjadikan penafsiran Hamka sebagai objek kajian yang muncul di era Orde Lama dengan pendekatan kekuasaan politik.

Tafsir Orde Lama: Tafsir Al Azhar karya Hamka

Sebutan Hamka yang banyak dikenal masyarakat Indonesia adalah sebuah nama singkatan dari nama panjang H. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, seorang ulama yang berasal dari tanah melayu Sumatera Barat. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1908 dari sepasang suami istri H. Abdul Karim Amrullah dan Shafiah binti Bagindo, Hamka adalah seorang ilmuwan dengan latar belakang sastra, budayawan, akademisi, sejarawan dan politikus, ia menguasai hampir semua disiplin ilmu keislaman, hal itu dibuktikan dengan produktifitasnya menghasilkan sebuah karya yang menurut penelitian James Rush berjumlah 115 judul (Wahid, 2017). Hamka dengan keilmuannya yang sangat luas adalah penerus ayahnya yang menjabat sebagai seorang pelopor gerakan modern Islam di Indonesia dan kakeknya yang juga seorang terkemuka di masa nya. Hamka wafat pada usianya yang ke 73 tahun pada tanggal 20 Juli 1981 (Shomad, 2013).

Menganalisis tafsir di Era Orde Lama atau pada masa demokrasi terpimpin dibawah kepemimpinan Soekarno, tafsir karya Hamka lah yang paling fenomenal di kalangan masyarakat Indonesia. Tafsir Hamka muncul pertama kali pada Tahun 1958 yang disampaikan dalam sebuah kajian subuh di Masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Kemudian pada Tahun 1962 materi pengajian ini mulai di muat di dalam majalah bernama *Gema Islam* (Humaira & Astuti, 2017). Hamka adalah seorang yang rasional, baginya jika dalam musyawarah negara pihak penguasa tidak akomodatif dan aspiratif pada semua kepentingan bangsa, sikap rasional Hamka akan berdampak menjadi sebuah kritis pada penguasa, sikap kritis inilah yang menjadikannya berujung pada konflik dengan pemerintah (Mujahidin, 2017). Dirinya dianggap berkhianat pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan NASAKOM, kejadian penangkapan ini terjadi pada tahun 1964 (Wahid, 2017). Hal unik yang menjadi fenomenal nya *Tafsir Al Azhar* adalah latar belakang penyelesaian penulisan tafsir ini disempurnakan ketika ia berada di dalam tahanan selama dua tahun lamanya dan Tafsir ini kemudian diterbitkan pada tahun 1967 yang diberi nama *Tafsir Al-Azhar* (Wahid, 2017).

Kehidupan Hamka sampai wafat berada dalam suasana gejolak politik yang kuat, ia hidup pada masa kolonial, kemerdekaan, pemberontakan PKI, dan rezim otoritarianisme di era Orde Baru, Maka dari itu, tafsir Al Azhar banyak diwarnai dengan unsur politik yang melatar belakangi kehidupan Hamka, hal ini mendorong Hamka menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat sebagai refleksi dari kekacauan politik di masa tersebut (Wahid, 2017).

Penggunaan corak penafsiran *adab ijtimai* (etika sosial) ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor audiens ketika Hamka menyampaikan tafsirnya dalam sebuah pengajian subuh yang dihadiri oleh masyarakat umum dengan berbagai kalangan individu, oleh sebab itu tafsir Hamka disampaikan dengan tema tema yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat itu, dan tidak dapat dipungkiri gejolak politik pada masa kehidupan Hamka merupakan permasalahan yang mendominasi

masyarakat Indonesia (Fatih, 2019). Zulkarnaini Abdullah dalam sebuah kajian komparatifnya mengatakan ada spontanitas yang terjadi pada penafsiran Hamka, karena latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan yang memang responsif terhadap persoalan yang sedang terjadi (Wahid, 2017).

Contoh penafsiran Hamka yang berkaitan dengan kondisi sosial dan politik yang sedang berlangsung adalah QS. Yusuf ayat 54-57 yang membahas historis Nabi Yusuf yang diangkat sebagai bendahara Mesir, dalam penafsirannya Hamka memulai dengan menceritakan peristiwa Nabi Yusuf yang dipenjarakan akibat tuduhan istri Al-Aziz saat itu, kemudian Hamka menceritakan permintaan Nabi Yusuf dan bagaimana Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan, dalam kisah ini Hamka menyampaikan pesan tersiratnya bahwa jabatan bukan hanya sebuah penghormatan, ia harus disertai dengan kepercayaan untuk menjalankannya, sikap Nabi Yusuf yang meminta jabatan didasari pada keinginannya mendapatkan kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat bukan kedudukan pribadi, dan juga asas yang paling utama dari terjaganya kesejahteraan Negara, yaitu kesanggupan menjaga, memelihara, dan tentu mengatur kekayaan Negara agar dikerluarkan pada kondisi yang tepat.

Tafsir Al Azhar secara umum menggunakan metode analitis atau tahlili, dengan menyebutkan semua aspek yang berkaitan dengan makna yang terkandung dalam ayat pada penafsirannya, Hamka menerangkan makna ayat al-Quran sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir (Fatih, 2019), meski Hamka adalah seorang pemerhati tasawuf, seni dan filsafat tetapi tafsirnya tidak mencerminkan corak *sufi falsafi*, karena Hamka menyadari bahwa konsumen pengajiannya adalah masyarakat umum (Fatih, 2019). Hamka dengan latar belakang sastranya menguak dan mengkritisi kondisi politik dengan bahasa yang lugas dan tidak terang-terangan (Humaira & Astuti, 2017). Bentuk penafsiran yang ditulis Hamka adalah ijthadi/ *Ra'yi*, meski Hamka tetap juga mengambil sumber dari periwayatan Sahabat, Tabiin, Ulama dan Mufassir sebelumnya (Taryudi & Setiawan, 2021).

Perkembangan Tafsir Al-Quran Era Orde Baru

Perkembangan penafsiran al-Quran di Indonesia tidak berhenti di era Orde lama, ditengah hebatnya gejolak perpolitikan pada masa pra dan pasca perpindahan kepemimpinan kepada Soeharto, justru eksistensi penafsiran al-Quran tetap berkembang pesat. Diantara tafsir yang muncul pada era Orde Baru adalah *Al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil* yang muncul pada tahun 1983 oleh seorang Kyai yang pernah menjadi seorang politisi bernama Misbah Zainul Mushtafa, tafsir lainnya adalah *Tarjamah Al-Quran Al-Ikhlis* karya seorang ulama Aceh bernama Mukhtar Yunan Usman, penafsirannya ia tulis lengkap 30 juz. Selanjutnya pada akhir era Orde Baru, tafsir *Dalam Cahaya Al-Quran* karya Syu'bah Asa muncul sebagai penafsiran al-Quran pada ayat-ayat sosial politik. Penulis menilai tafsir Syu'bah Asa sesuai untuk dijadikan objek kajian penulisan ini karena penafsirannya berkenaan langsung dengan politik kekuasaan.

Tafsir Orde Baru: Dalam Cahaya al-Quran: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik karya Syu'bah Asa

Tafsir politik di Era Orde Baru, banyak ditulis para mufassir sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah yang menekan pergerakan umat Islam, tafsir Syu'bah Asa menjadi salah satu dari sekian banyak tafsir yang lahir di masa ini. Syu'bah Asa adalah seorang mufassir asal Pekalongan yang lahir pada tanggal 21 Desember 1941. Ia tumbuh menjadi seorang seniman teater, sastra dan wartawan, karir penulisannya muncul sejak ia belajar di bangku SLTP pada tahun 1957 dan bakatnya ini berkembang hingga ia menjadi redaktur musik di majalah *Ekspress* yang merupakan cikal bakal majalah *Tempo*, kemudian ia keluar dan bergabung menjadi redaksi majalah *Panji Masyarakat*, pada saat itulah ia banyak menulis hal-hal yang berkenaan tentang keagamaan dan permasalahan sosial. Syu'bah Asa wafat pada usia 68 tahun, tanggal 24 Juli 2011 (Aliyah, 2015).

Tafsir Syu'bah Asa bermula dari artikel-artikel yang ditulisnya dalam majalah mingguan *Panji Masyarakat* dalam rentang waktu 1997 sampai 1999. Pada tahun 2000 tafsirnya diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama dengan judul *Dalam Cahaya Al-Quran: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Tafsir ini ditulis dengan metode tematik, karena ia menulisnya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang muncul

pada saat tafsir itu ditulis yaitu pada akhir rezim Orde Baru, setiap ayat yang dikemukakan akan sesuai dengan waktu dan peristiwa yang sedang terjadi, diibaratkan ayat Al-Quran adalah cahaya yang menyoroti kejadian-kejadian yang populer pada saat itu (Aliyah, 2015), sehingga Al-Quran dipandang hidup dan sesuai dengan ungkapan “*Shalih likulli zaman wa makan*”, maka tafsir Syu’bah Asa dikenal dengan tafsir yang kental dengan nuansa sosial politik Indonesia era Orde Baru. Tafsir ini muncul untuk mengkritik kebijakan-kebijakan rezim Soeharto yang tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran.

Syu’bah Asa pada masa penulisan tafsirnya berada pada memontum yang tepat untuk dapat mengkritisi pemerintah. Dari sudut subjek penafsir, Syu’bah Asa adalah seorang wartawan, budayawan, dan agamawan yang memunculkan sikap kritis terhadap penyimpangan disekitarnya. Dan dari sudut konteks situasi sosial dan ruang publikasi, tafsir ini berada pada dua momentum yang tepat; *pertama*, tafsir Syu’bah ditulis ketika arus reformasi sedang menguat menghancurkan rezim Orde Baru. *Kedua*, dunia pers mulai mengambil peran untuk menyampaikan kritik dan majalah *Panji Masyarakat* pada saat itu menjadi media yang dipakai sebagai sikap kritis Syu’bah Asa (Sunarto, 2019).

Secara umum, dalam tafsir yang ditulis oleh Syu’bah berisi empat topik utama, yaitu penegakkan keadilan, pelanggaran HAM, praktik korupsi dan praktik keberagaman yang hanya sebatas pemanis. Keempat topik ini berkaitan erat dengan permasalahan sosial politik rezim Orde Baru sebagai gerakan kritik sosial yang berhadapan langsung dengan hegemoni dan dominasi rezim Orde Baru (Sunarto, 2019).

Diantara contoh ayat yang dijadikan kritik politik adalah, penafsirannya pada QS. Al An’am: 65, yang mengkritik permasalahan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ۖ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا ۖ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Ayat ini bermakna tentang siksaan Allah kepada orang-orang yang melakukan pembangkangan kepada Allah swt, kemudian Syu’bah menggabungkan makna ayat ini ke dalam konteks permasalahan keindonesiaan yang sedang terjadi, ia mengatakan bahwa rezim Orde Baru telah melakukan gerakan politik yang melanggar HAM dengan tidak memberikan kesempatan bekerja dalam birokrasi pemerintah bagi keluarga, sanak saudaranya aktivis atau simpatisan PKI, karena mereka telah dianggap melakukan kriminal terhadap kedaulatan negara dengan melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965 (Sunarto, 2019).

Dengan pendekatan kontekstual yang memandang realitas sebagai medan penafsiran, ia mengkritik sikap pemerintah dengan penekanan hukum moral pada ayat yang menyebutkan bahwa Allah swt berkuasa memberikan hukuman dengan menceraikan mereka. Acuan yang dipakai oleh Syu’bah Asa sebagai bentuk penafsiran adalah al-Quran, hadits, tafsir-tafsir terdahulu, dan ijtihadnya sebagai mufassir (*Ra’yi*). Metode penafsirannya termasuk pada kategori tematik modern karena mengangkat tema yang dipilih langsung oleh Syu’bah dengan corak *Adab Ijtima’i* (etika sosial) dan gaya bahasa penulisan kolom yang dapat mengangkat imajinasi dan bathin pembaca (Taryudi & Setiawan, 2021). Selain itu, tafsir ini juga termasuk dalam kategori tafsir tematik plural yang cara penyajiannya terdapat banyak tema penting sebagai objek kajian (Aliyah, 2015).

Perkembangan Tafsir Al-Quran Era Reformasi

Era Reformasi dimulai sejak Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, pada masa ini muncul corak tafsir ilmiah, yaitu upaya menggabungkan ayat al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti sains, sastra, dll. Selain itu, muncul metode penafsiran tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan kesesuaian tema, metode ini diperkenalkan oleh tokoh agamawan dan politisi Prof. Dr. Quraish Shihab. Diantara beberapa karya penafsirannya, penulis menjadikan tafsir al-Misbah sebagai objek kajian.

Tafsir Reformasi: al-Misbah Karya Quraish Shihab

Tafsir politik di era reformasi, tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, seorang ulama serta guru besar dalam bidang tafsir yang kontribusi pemikirannya banyak dituangkan dalam tulisan, salah satu karya terkenalnya adalah tafsir al-Misbah. Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. M. Quraish Shihab sendiri adalah seorang cendekiawan muslim asal Indonesia yang lulus dari Universitas ternama, yaitu Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tafsir al-Misbah ditulis dalam dua masa, yaitu masa ketika Quraish Shihab menjabat sebagai Duta Besar, Mesir pada tahun 1999. Tafsir ini mulai ditulis pada hari Jum'at, 18 Juni tahun 1999, yang pada awalnya hanya ingin menulis maksimal 3 volume saja, namun kenikmatan ruhani yang diteguknya dari menulis kalam Ilahi berlanjut hingga berakhir masa jabatannya sebagai Duta Besar tahun 2002 dan Quraish berhasil menulis sebanyak 14 Jilid Tafsir al-Misbah. Lalu masa yang kedua berlanjut saat dirinya pulang ke Jakarta, Quraish menuntaskan penulisan jilid terakhirnya yaitu jilid ke 15 tepat pada hari Jum'at, 05 September 2003 (Shihab, 2015).

Terdapat perbedaan penulisan tafsir ketika masih berada di Mesir dan kembalinya ke Jakarta. Tafsir yang ditulis ketika di Mesir belum menampilkan problem keindonesiaan dalam epistemologis yang dihadapi masyarakat pada saat tafsir tersebut ditulis. Pada akhir tahun 1990, Indonesia mengalami perubahan politik serta dinamika pemahaman keagamaan, misalnya maraknya kajian kesetaraan gender (Zulaiha et al., 2021) dan perlunya dibangun hubungan sosial antar umat beragama (Said, 2015).

Kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an dalam konteks kekinian atau modern, menafsirkan ayat-ayat Allah, Shihab cenderung menekankan pentingnya menggunakan metode tematik yang dikembangkan oleh para penulis kontemporer, seperti Abbas Mahmud al-'Aqqad, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu al-'A'la al-Maududi. Metode maudhu'i merupakan model penafsiran dengan mengumpulkan beberapa ayat yang tersebar dalam surat-surat berbeda yang membahas pokok bahasan yang sama. Setelah menjelaskan makna umum dari ayat-ayat tersebut, mufasir menarik kesimpulan sesuai dengan topik yang dibahas (Shihab, 2015). Menurutnya, dengan menggunakan metode ini dapat mengungkapkan pendapat al-Qur'an tentang berbagai persoalan kehidupan, sekaligus sebagai bukti bahwa al-Qur'an adalah kitab yang cocok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dalam penulisan tafsirnya, selain penggunaan metode tematik, Quraish tetap memadukannya dengan metode tahlili, hal ini ia lakukan karena menurutnya ia perlu menjelaskan seluruh ayat dan surat sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf utsmani sehingga pandangan dan pesan kitab suci bisa dihidangkan secara mendalam dan menyeluruh sesuai tema-tema yang dibahas (Shihab, 2015).

Menurut Direktur *Program Center for Qur'an Studies*, Muchlis Hanafi, selain kombinasi kedua metode tersebut, penafsiran al-Misbah juga menekankan pada corak ijtimai (sosial). Uraian tersebut nampaknya menyebabkan masalah yang terjadi di masyarakat. Secara spesifik, menurut Muchlis, kontekstualisasi corak kontemporer dan keindonesiaan sangat mewarnai al-Misbah (Shihab, 2015).

Tafsir yang ditulis Quraish Shihab pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan politik menunjukan bahwa ia mencoba mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam ranah politik kedalam kehidupan sosial, salah satunya dalam memilih seorang pemerintah, beliau menggunakan pendekatan Qur'ani dengan berusaha memberikan solusi alternatif. Ini terlihat ketika beliau memberikan penafsiran pada QS. Ali Imran [3]: 159 terkait kualifikasi seorang pemimpin.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa Allah menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, yaitu dengan jalan musyawarah serta memberi petunjuk, masyarakat dan penguasa harus memiliki pendekatan. Hal ini memberikan isyarat bahwa kehidupan Negara demokrasi Indonesia harus diterapkan (Shihab, 1994).

Dalam pesannya pada pemilihan calon presiden Indonesia, Quraish Shihab menyampaikan pesannya dengan tegas dan berani kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno putri yang lolos pada putaran kedua Pemilihan Presiden 2004-2009, "*Jangan menjalankan pemerintahan seperti corang bodoh, yang mengira mereka akan berkuasa sepanjang waktu atau seumur hidup mereka, jangan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh para diktator; jangan biarkan yang angkuh atau yang berkuasa memiliki kesempatan untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Jika anda mengabaikan ini, maka anda akan menanggung kesahan anda sendiri dan kesalahan mereka*" (Shihab, 2007).

Contoh lain ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 247, horizon masa kini yang ditampilkan Quraish Shihab pada penafsiran ayat tersebut bahwa kekuasaan yang direstui oleh Allah adalah yang bersumber dari-Nya, dalam pengertian bahwa adanya hubungan baik antara penguasa dan Allah. Bagi masyarakat saat ini, jika ingin memilih seorang pemimpin jangan terkecoh dengan latar belakang, status sosial, atau popularitas anda, tetapi andalkan sifat-sifat dan kualifikasi yang dapat mendukung tugas yang dihadapi oleh calon pemimpin (Shihab, 2017).

Dalam buku *Wawasan al-Qur'an* mengulas tema politik dalam al-Qur'an. Quraish Shihab menyatakan bahwa mendirikan sholat, menunaikan zakat merupakan hubungan yang baik dengan Allah dan merupakan lambing perhatian kepada masyarakat yang lemah. Dengan demikian, kesholehan pemimpin dan politisi diukur dari hubungan pribadinya dengan Tuhan (Shihab, 1996). Perspektif ibadah dalam Islam menjadikan seseorang tidak kritis terhadap persoalan politik, karena Islam akan menjadikan agama moral dalam menyuarakan nilai-nilai individual.

Pandangan politik tersebut telah mengantarkan Quraish Shihab untuk membina hubungan baik dengan mantan presiden ke-dua yaitu Soeharto. Selama masa kepemimpinannya sebagai pemimpin Orde Baru, Soeharto menunjukkan dirinya sebagai seorang Muslim yang rajin sholat, selalu membayar zakat, pernah pergi haji, dan selalu membawa hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Praktik ibadah ini telah memenangkan hati umat Islam tertentu, bahkan ulama termasuk penulis *Tafsir al-Misbah* sehingga pemerintahan Soeharto bisa bertahan selama 30 tahun.

Quraish Shihab diberi kepercayaan menjadi menteri agama menjelang akhir masa jabatan Soeharto. Shihab juga aktif di MUI dan menjadi ketua MUI pusat pada tahun 1984-1998, Direktur Kader Ulama MUI 1994-1997 (Shihab, 2005). MUI adalah salah satu yang meligitimasi kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1985, Negara memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai UU Azas Tunggal yang memicu banyak kontroversi terutama dikalangan organisasi Islam (Kuntowijoyo, 1997). Quraish Shihab menulis berbagai topik dengan pendekatan tafsir maudhu'i untuk mendukung wacana yang berkembang pada masa Orde Baru dengan isu-isu agama, pemerintahan, masyarakat, politik, kesehatan, dan isu-isu lainnya.

Hasil penelitian dari Taryudi Taryudi dan Tatan Setiawan dalam jurnalnya bahwa corak perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia di tengah politik kekuasaan yang mengitarinya menunjukkan bahwa pemikiran yang berkembang dipengaruhi oleh corak *Adab Ijtima'i* (etik sosial). Hal ini diketahui setelah dipelajari menggunakan teori Michel Foucault tentang hubungan yang signifikan antara kekuasaan dan pengetahuan. Melalui teorinya, tampak adanya hubungan antara kekuasaan (power) yang dalam konteks ini memmanifestasikan dirinya dalam politik kekuasaan selama tiga era kekuasaan di Indonesia pada masa kemerdekaan yakni: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi serta pengetahuan (*knowledge*) diwujudkan dalam produk interpretasi para mufasir yang disesuaikan dengan era kekuasaan politiknya. Apabila diringkaskan, metodologi tafsir di Indonesia adalah seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Metodologi Tafsir Di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)

Contoh Tafsir	Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Orde Lama)	Dalam Cahaya Al-Quran karya Syu'bah Asa (Orde Baru)	Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraishy Shihab (Reformasi)
Metode	Analitis/Tahlili	Tematik	Tematik
Corak	Adab Ijtima'i	Adab Ijtima'i	Adab Ijtima'i
Bentuk Penafsiran	Ijtihad Ra'yi	Ijtihad Ra'yi	Ijtihad Ra'yi
Contoh Penafsiran	QS. Yusuf:54-57 "Nabi Yusuf sebagai teladan dalam kepemimpinan"	QS. Al An'am: 65 "Hukuman bagi pemimpin yang melanggar HAM "	QS. Ali Imran:159 "Kualifikasi Pemimpin"

4. Kesimpulan

Dinamika politik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa Reformasi mengalami permasalahan yang sangat kompleks, salah satunya yaitu dominasi kebijakan kaum Nasionalis yang tidak memberi kebebasan ruang gerak bagi umat Islam Indonesia. Tekanan yang terjadi, mendorong sebagian umat Islam merespon isu terkini dengan mengaitkannya pada makna al-Quran, mengingat al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman yang didalamnya mengatur urusan kehidupan bermasyarakat.

Upaya mengaitkan permasalahan politik dengan makna al-Quran yang beririsan (pengetahuan dan kekuasaan) menjadikan penggunaan metode penafsiran di Indonesia relatif mengarah kepada corak *adab ijtima'i* (etika sosial) meski dengan latar belakang pemilihan metode yang berbeda di kalangan mufasir. Kesamaan corak penafsiran ini terindikasi oleh latar belakang historis mufasir, *Pertama*, Latar belakang penggunaan corak adab ijtima'i pada Hamka adalah karena Tafsir Al-Azhar pada mulanya disampaikan di sebuah pengajian dengan audiens masyarakat umum, hal ini menjadikan Hamka mengaitkan permasalahan keindonesiaan dengan makna al-Quran. *Kedua*, Latar belakang profesi Syu'bah Asa sebagai seorang wartawan, agamawan dan budayawan menjadikan dirinya responsif terhadap hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan agama, maka penafsirannya ia tulis sebagai respon kebijakan rezim Orde Baru. *Ketiga*, latar belakang Quraish Shihab menggunakan corak adab ijtima'i dalam penafsirannya adalah karena ia menjabat sebagai Menteri Agama yang berkuasa mengatur permasalahan sosial dan juga untuk membina hubungan baik dengan mantan Presiden Orde Baru yaitu Soeharto.

Referensi

- Ahmad E.Q., N., & Sartika, E. (2020). *Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah* (M. T. Rahman & E. Zulaiha (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Zarqānī, M. al-'Azīm. (1995). *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān. Cet. I.*
- Aliyah, H. (2015). Epistemologi Tafsir Syu'bah Asa. *Dalam Jurnal Hermeneutik*, 9.
- Crespy, A., & Vanheuverzwijn, P. (2019). What "Brussels" means by structural reforms: empty signifier or constructive ambiguity? *Comparative European Politics*, 17(1), 92–111.
- Fatih, M. (2019). Konsep Ulama dalam Pandangan Mufassir Indonesia: Studi Aspek-aspek Keindonesiaan dan Metodologi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Penafsirannya terhadap Term "Ulama" dalam al-Qur'an. *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction*, 3(2), 67–78.
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Quran Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Foucault, M. (1997). *The politics of truth*. Semiotext.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Humaira, D., & Astuti, P. (2017). Kritik Sosial-Politik dalam QS. Yusuf ayat 54-57. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 81–90.
- Husni, A. al-R. H. bin M. (2012). *Masirah 'Ilm al-Tafsir min Manzḥūr Syekh Muhammad al-Fadhil bin 'Ashur fi Kitābih:*

- al-Tafsir wa Rijaluh*. Majalah al-Dirasat al-Qur'aniyyah.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas politik umat Islam*. ATF Press.
- Lazarski, C. (2021). 2-Liberty's Ancient Roots. In *Power Tends To Corrupt* (pp. 37–59). Cornell University Press.
- Mujahidin, A. (2017). Tafsir Alquran dan Praktik Politik Umat Islam Indonesia Perspektif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 7(2), 375–395.
- Mulyaden, A. (2021). Kajian Semiotika Roland Barthes terhadap Simbol Perempuan dalam Al-Qur'an. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 139–154.
- Oxford, P. U. (2020). *Oxford Learner's Dictionaries*. Oxford University Press.
- Rahman, M. T. (2016a). Limits to Growth : Mempersoalkan Kembali Kapitalisme. *JAQFI*, 1(1), 1–12.
- Rahman, M. T. (2016b). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. LEKKAS.
- Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Said, H. A. (2015). *Diskursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir Mishbah*.
- Shihab, M. Q. (1994). Tafsir Al-Misbah. In *Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 2).
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2005). *Logika agama: Kedudukan wahyu & batas-batas akal dalam Islam*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah cahaya ilahi: Hidup bersama al-quran*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2015). *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shomad, B. A. (2013). Tafsir al-Qur'an & Dinamika Sosial Politik (Studi terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. *Jurnal Tapis*, 9(2).
- Sunarto, S. (2019). Dinamika Tafsir Sosial di Indonesia. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 3(1), 83–95.
- Svarstad, H., Benjaminsen, T. A., & Overå, R. (2018). *Power theories in political ecology*.
- Taryudi, T., & Setiawan, T. (2021). Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 63–70.
- Van der Kamp, D. S. (2021). Blunt force regulation and bureaucratic control: Understanding China's war on pollution. *Governance*, 34(1), 191–209.
- Wahid, A. (2017). Sosial Politik dalam Tafsir HAMKA. *ARICIS PROCEEDINGS*, 1.
- Zulaiha, E., Putra, R. A., & Gani, R. A. (2021). Selayang Pandang Tafsir Liberal di Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).